

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) EXIT MANDIRI DALAM PERSPEKTIF *THE MOST SIGNIFICANT CHANGE TECHNIQUE* (MSCT)

Ainun Oktavia Sari¹, Rahayu Sulistyowati², Ita Prihantika³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
firstayuni53@gmail.com

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pemberian bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Keluarga Harapan terhadap eks Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan yang keluar secara mandiri di Kecamatan Pagelaran dengan indikator perubahan kondisi ekonomi, perubahan kualitas kesehatan, dan perubahan kualitas pendidikan. Dalam mengevaluasi dampak dari program ini, peneliti menggunakan teori evaluasi dampak dengan menggunakan teknik *Most Significant Change* (MSC) yang merupakan teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan yang paling penting dalam kehidupan keluarga hasil dari keikutsertaan dalam program kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pagelaran telah memberikan dampak perubahan pada eks Keluarga Penerima Manfaat baik yang bersifat positif maupun negatif. Dilihat dari dampak positifnya, eks Keluarga Penerima Manfaat telah mengalami perubahan kearah yang lebih baik terutama pada bidang ekonomi, dan juga pendidikan. Akan tetapi, belum tampak adanya perubahan dalam bidang kesehatan dikarenakan informan eks Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pagelaran merupakan penerima bantuan pada bidang pendidikan. Meskipun negatifnya ialah kurang patuhnya eks Keluarga Penerima Manfaat saat menjadi peserta pada komitmen pendidikan.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Keluarga Harapan (PKH), *Most Significant Change* (MSC), Graduasi Mandiri.

Abstract

The Conditional Cash Transfer (CCT) is a conditional social cash transfer program that provides assistance to Very Poor Households (RTSM) appointed as participants in the Conditional Cash Transfer program which is related to improving the quality of human life through education and health. This study aims to analyze the impact of Conditional Cash Transfers on ex-families who receive of Conditional Cash Transfers who go out independently in Pagelaran District with indicators of changes in economic conditions, changes in health quality, and changes in the quality of education. In evaluating the impact of this program, the researcher used the impact evaluation theory using The Most Significant Change technique (MSC) which is a participatory monitoring and evaluation technique that aims to obtain information about the most important changes in family life resulting from participation in poverty programs. The results of this study indicate that the Conditional Cash Transfer in Pagelaran District has a changing impact on the Former Beneficiary Family both positive and negative. Seen from the positive impact, the Former Beneficiary Family have experienced changes for the better, especially in the fields of economy and education. However, there has been change in the health sector because the informant of the Former Beneficiary Family in Pagelaran District was the recipient of assistance in the education sector. However, the negative side is the lack of compliance of former recipient families when they become participants in education.

Keywords: Evaluation, Cash Conditional Transfer 'CCT' (PKH), *Most Significant Change* (MSC), Independent Graduation.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Suharyanto dalam Syawie, 2011: 217). Kemiskinan dapat mempengaruhi kehidupan keluarga miskin dalam sejumlah hal lain. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini sedang dijalankan di Indonesia dan termasuk dalam kategori kelompok klaster satu pada instrumen penanggulangan kemiskinan. Dalam dunia internasional program ini dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial di Indonesia dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia, Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Pelaksanaan PKH di Indonesia mulai diujicobakan pada tahun 2007 dengan tahap uji coba di 7 (tujuh) provinsi dengan jumlah sasaran program sebanyak 387.928 RTSM. PKH sudah diberlakukan di Provinsi Lampung pada tahun 2010 yang meliputi 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada tahun 2017, pengembangan PKH menjadi 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, salah satunya adalah Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pringsewu mulai dilaksanakan di tujuh kabupaten pada tahun 2012 dengan jumlah KPM 4.797 tervalidasi, hingga pada awal 2016 tersebar secara merata di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan jumlah KPM 7.277 tervalidasi.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Pringsewu merupakan sebuah solusi dari pemerintah untuk membenahi permasalahan pendidikan dan kesehatan, dan sesuai arah kebijakan nasional penerima PKH wajib mendapatkan komplementaritas program

bantuan sosial lainnya, BPNT atau rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada KPM, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi KPM PKH. KPM yang sudah sejahtera dibimbing untuk melakukan graduasi mandiri, graduasi mandiri merupakan peserta PKH yang sudah meningkat status ekonomi dan kesejahteraannya sehingga secara sadar dan sukarela keluar dari kepesertaannya di Program Keluarga Harapan (PKH).

NO	Tahun	Graduasi Mandiri	Total KPM
1	2020	388	16.267
2	2019	31	16.332
3	2018	24	16.865
4	2017	-	7.887
5	2016	-	7.277

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Pringsewu, 2020

Berdasarkan tabel di atas, data daftar graduasi mandiri yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa tujuan utama PKH dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu terlihat semakin nyata. Seperti dalam wawancara dengan Dedy Akhmadi Staff Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu menuturkan jika inisiasi graduasi mandiri PKH di Kabupaten Pringsewu baru dilaksanakan mulai tahun 2017, dapat dibuktikan melalui tabel di atas jika PKH sangat mendorong peserta PKH untuk keluar dari jalur kemiskinan sehingga mulai dari tahun 2018 sampai 2020 peserta PKH yang melakukan graduasi mandiri semakin meningkat.

Kecamatan Pagelaran merupakan salah satu kecamatan dengan KPM terbanyak yang melakukan graduasi mandiri. Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Kecamatan Pagelaran ini untuk melihat seberapa besar keberhasilan dampak PKH mempengaruhi

para KPM yang melakukan graduasi mandiri ini.

Keberhasilan PKH untuk mengurangi kemiskinan tergantung pada ukuran terhadap perubahan yang terjadi dan apakah perubahan merupakan akibat dari program tersebut ataukah ada penyebab lain. Oleh karena itu, diperlukan kajian tentang dampaknya. *Pertama*, pada penelitian Bappenas (2009: 57) menyimpulkan bahwa PKH berhasil meningkatkan angka kunjungan Posyandu, pemantauan tumbuh kembang anak serta kegiatan imunisasi, akan tetapi pengaruh terhadap indikator pendidikan relatif kecil. *Kedua*, Lewis dan Nugraha (2013: 400) menemukan bahwa PKH memiliki dampak positif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. *Ketiga*, Agus dan Sri (2016: 9) menyimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat akan tetapi dampak yang dihasilkan belum terlalu signifikan.

Berbagai hasil penelitian di atas terlihat bahwa PKH menghasilkan dampak yang positif dari segi selama pelaksanaan PKH. Akan tetapi, berbagai penelitian di atas belum ada yang menjelaskan dampak perubahan yang signifikan terhadap KPM PKH yang *exit* mandiri (graduasi mandiri) maka dengan menggunakan teknik MSC (*Most Significant Change*) penelitian ini ingin melihat dampak perubahan yang dihasilkan PKH terhadap KPM yang *exit* mandiri di Kecamatan Pagelaran, baik dampak positif maupun negatif.

Tujuan dari teknik ini adalah untuk melihat perubahan-perubahan signifikan yang nampak setelah pelaksanaan PKH kepada KPM PKH di Kecamatan Pagelaran. Perubahan dari dampak tersebut dapat dilihat dari akibat atau manfaat yang dirasakan eks KPM PKH Kecamatan Pagelaran baik secara objektif maupun subjektif. Kedua aspek tersebut dimaksud sekaligus mencerminkan perubahan perilaku eks KPM PKH hingga mengarah kesejahteraan sosial.

Evaluasi Kebijakan

Pendapat Muhadjir dalam Widodo (2018: 112) evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan yang ditentukan. Secara sederhana Nugroho (2009: 699) mendefinisikan evaluasi sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap suatu kebijakan. Sedangkan menurut Lester dan Steward dalam Winarno (2008: 226) evaluasi dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) tugas yang berbeda. *Pertama*, menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarinya. *Kedua*, menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Weiss dalam Widodo (2018: 114) menyatakan riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang.

Terkait dengan uraian tersebut, evaluasi kebijakan publik menurut Weiss dalam Widodo (2018: 114-115) mengandung beberapa unsur penting, yaitu: 1) Untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan. 2) Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar. 3) Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. 4) Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the purpose social*) dari evaluasi.

Evaluasi Dampak

II. TINJAUAN PUSTAKA

Irawan dalam Sari (2015: 29) mendefinisikan dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (dampak). Sedangkan menurut Widodo (2018: 120) riset evaluasi *impact/dampak* lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (*intended impacts*). Riset *evaluation impact* ini bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Pendapat lain menurut Rossi dan Freeman dalam Parson (2008: 604) evaluasi dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Adapun beberapa kriteria menurut Rossi dan Freeman yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus analisis yakni sebagai berikut: a) Peluang terjadinya dampak. b) Jumlah orang yang terkena dampak. c) Untung rugi yang di derita oleh subyek dampak. d) Ketersediaan data untuk melakukan analisis.

Untuk mengkaji dampak PKH, peneliti menggunakan evaluasi sumatif dengan metode penelitian dampak menurut Rossi dan Freeman yang meliputi tiga variabel ini, antara lain: 1) Membandingkan *problem* atau situasi atau kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi. 2) Menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkan dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi. 3) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program.

Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2008-2009 yang dicanangkan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan serupa di Negara lain dikenal dengan istilah *Cash Conditional Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH 2019, Program Keluarga Harapan bertujuan: 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPFM dan OTM), memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - 1) Ibu hamil/menyusui, dan
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - 1) Anak SD/MI atau sederajat.
 - 2) Anak SMP/MTs atau sederajat.
 - 3) Anak SMA/MA atau sederajat.
 - 4) Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan
 - 2) Penyandang disabilitas berat.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) pada eks Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan menekankan pada dampak perubahan sosial-ekonomi eks KPM sebagai akibat dari adanya PKH. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Most Significant Change* yaitu bentuk monitoring dan evaluasi parsipatif. Teknik MSC ini melibatkan proses pengumpulan cerita/kisah mengenai perubahan signifikan (*significant change/SC*) yang berasal dari lapangan dan pemilihan secara sistematis cerita-cerita yang paling signifikan oleh sebuah panel *stakeholder* atau staf yang ditunjuk.

Davies and Dart dalam Mukhotib, dkk (2016: 24) menentukan tahapan-tahapan dalam penerapan MSC, yaitu:

a. Menentukan Domain Perubahan

Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan domain perubahan individu dalam penelitian. Pada domain ini akan menunjukkan perubahan apa yang terjadi pada setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan program (penerima manfaat) berdasarkan fokus penelitian yaitu dampak sosial-ekonomi. Individu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah eks keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Pagelaran.

b. Koleksi Data

Dalam pengumpulan data MSC, peneliti menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu: 1) Wawancara, 2) Observasi (Pengamatan), 3) Dokumentasi.

c. Analisis Cerita: Seleksi Cerita

Seleksi cerita terhadap cerita perubahan bukan pada pemilihan cerita yang akan

dianalisis, melainkan melakukan pengutipan pernyataan-pernyataan yang dinilai menunjukkan adanya perubahan pada domain yang telah dipilih. Analisis data yang digunakan peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data (*Data Reduction*), 2) Sajian data (*Data Display*), 3) Penarikan Kesimpulan.

d. Gaya Penulisan Cerita Perubahan

1. Gaya Penulisan Orang Pertama/Narasi

Gaya narasi berarti bahwa cerita disampaikan langsung oleh yang bersangkutan. Gaya cerita seperti ini membangun karakter yang lebih kuat pada cerita perubahan, menjadi lebih yakin bahwa perubahan mendasar adalah sesuatu yang nyata karena diceritakan langsung oleh yang bersangkutan.

2. Gaya Penulisan Orang Kedua/Reportase

Gaya penulisan reportase ini, penulis memiliki kebebasan lebih untuk menambah informasi ke dalam cerita perubahan dengan tujuan untuk menghasilkan cerita yang menarik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan gaya penulisan orang pertama/narasi dikarenakan gaya tersebut disampaikan langsung oleh yang bersangkutan. Sehingga penyajiannya dapat memudahkan peneliti dalam mengolah data, selain itu dapat terlihat lebih alami dan nyata karena perubahan diceritakan langsung oleh yang bersangkutan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, baik dalam bentuk wawancara, observasi maupun hasil dokumentasi yang telah menghasilkan berbagai data terkait Dampak Sosial Ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) *Exit* Mandiri di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif *The Most Significant Change technique* (MSCt). Instansi yang terkait dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten Pringsewu dalam naungan Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu. Penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang akan dipaparkan peneliti yaitu dengan menggunakan teori yang telah

dijelaskan pada tinjauan pustaka. Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami fenomena yang terjadi secara dengan menggunakan teori-teori dari para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan dari penuturan beberapa eks KPM PKH yang keluar secara mandiri bahwa PKH:

- 1) sudah memberikan dampak perubahan ekonomi yang baik walaupun belum cukup signifikan, disebabkan masih adanya beberapa eks KPM PKH yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat masih kurang efektif dalam penggunaannya karena tidak ada pengawasan langsung sehingga pemanfaatan bantuan belum tepat, sehingga bagi beberapa peserta juga belum nampak cukup perubahan yang signifikan.
- 2) belum memberikan dampak perubahan kualitas kesehatan eks KPM Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Pagelaran disebabkan banyaknya penuturan dari informan eks KPM PKH tersebut adalah penerima bantuan bidang pendidikan, jadi bantuan yang diterima digunakan untuk keperluan pendidikan anak sekolah. Sehingga bagi beberapa peserta juga tidak merasakan adanya perubahan kualitas kesehatan dengan adanya bantuan tersebut.
- 3) sudah memberikan dampak perubahan kualitas pendidikan yang dirasakan para eks KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang keluar secara mandiri merasakan perubahan yang dialaminya, disebabkan bantuan tersebut cukup mempengaruhi kebutuhan pendidikan anak.

Dampak Sosial Ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Riset evaluasi *impact*/dampak lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (Widodo, 2018:120). Penelitian mengenai evaluasi dampak PKH terhadap eks KPM PKH di

Kecamatan Pagelaran diukur dari data-data hasil temuan berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi telah diklasifikasikan sebelumnya ke dalam indikator-indikator yang telah ditentukan. Peneliti juga menggunakan teknik MSC (*Most Significant Change*) untuk mengukur dampak perubahan dari PKH di Kecamatan Pagelaran yaitu dengan menggali cerita perubahan setelah mengikuti program tersebut, teknik MSC yang peneliti gunakan juga didukung oleh metode evaluasi dampak dari Rossi dan Freeman dalam Parsons (2011: 64) dengan cara membandingkan *problem* atau situasi atau kondisi dengan apa yang terjadi sebelum dan sesudah intervensi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting dalam suatu program, dengan adanya evaluasi dampak tersebut dapat mengetahui kualitas dari desain program tersebut yang telah dilaksanakan pemerintah apakah membawa perubahan yang baik atau sebaliknya. Adapun indikator-indikator yang digunakan peneliti adalah perubahan kondisi ekonomi, perubahan kualitas kesehatan, dan perubahan kualitas pendidikan.

1. Perubahan Kondisi Ekonomi

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah perubahan kondisi ekonomi. Indikator perubahan kondisi ekonomi terhadap eks Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang keluar secara mandiri ini dilihat dari segi daya beli kelompok sasaran apakah ada perubahan baik ataupun buruk setelah keluar dari program tersebut. Adapun perubahan-perubahan yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat yang dimaksudkan sebagai domain perubahan individu dalam evaluasi dampak program ini. Oleh karena itu, peneliti membagi menjadi tiga perubahan penting yang dialami oleh eks Keluarga Penerima Manfaat yang keluar secara mandiri.

Peserta PKH Kecamatan Pagelaran merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin yang rata-rata memiliki kepala keluarga yang berkerja sebagai buruh serabutan. Mereka tidak memiliki penghasilan tetap bahkan

terkadang tidak memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PKH, salah satu tujuan tersebut adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Semenjak hadirnya PKH yang diimplementasikan dengan pemberian uang tunai bersyarat kepada peserta PKH Kecamatan Pagelaran. Bantuan yang diberikan bukan semata-mata memberikan manfaat langsung kepada peserta PKH untuk meningkatkan kondisi ekonominya, akan tetapi dibagi ke dalam beberapa komponen, yaitu komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, dalam penelitian ini domain perubahan individu adalah kelompok eks KPM PKH Kecamatan Pagelaran khususnya yang keluar secara mandiri.

Eks KPM PKH Kecamatan Pagelaran menceritakan bahwa dengan diberikannya bantuan uang tunai ini, mereka yang sebelumnya harus bekerja pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sekarang setidaknya kebutuhan keluarganya dapat terjamin. Meskipun terlihat sebagai hal yang kecil, bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Pagelaran yang sekarang statusnya sudah keluar secara mandiri bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Bantuan tersebut dapat menekan beban pengeluaran keluarganya.

Pencapaian tujuan pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kondisi ekonomi pesertanya dapat dilihat dari status eks KPM PKH Kecamatan Pagelaran yang keluar secara mandiri, karena meningkatnya status ekonominya walaupun masih ada komponen yang belum selesai. Mereka malu lantaran mereka sudah menganggap dirinya mampu dan tidak perlu lagi di bantu dengan program tersebut. Meskipun kesadaran para penerima PKH ini untuk keluar mandiri masih dalam kategori dibimbing, setidaknya mereka mempunyai rasa mau dan maju agar tidak ketergantungan oleh bantuan tersebut. Perubahan tersebut memang belum dapat dikatakan sebagai perubahan dampak yang besar tapi perubahan ini dapat dilihat dari apa yang telah disampaikan oleh para eks peserta. Kondisi ini menunjukkan

keberhasilan tujuan PKH dalam Pedoman Pelaksanaan PKH 2019 yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

2. Perubahan Kualitas Kesehatan

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdampak pada tidak optimalnya tumbuh kembang anak, terutama pada anak usia 0-6 tahun. Salah satu yang menunjukkan PKH sebagai program yang efektif adalah tercapainya tujuan PKH untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi peserta PKH. Guna mendorong tercapainya tujuan tersebut, PKH memberikan ketentuan dan syarat bagi para peserta yang salah satunya adalah secara rutin melakukan kehadiran di dalam pelayanan kesehatan minimal 85% dengan komponen didalamnya ibu hamil/anak balita.

Hasil penelitian oleh peneliti kepada eks KPM PKH Kecamatan Pagelaran rata-rata penerima program adalah anak usia sekolah yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh para informan penelitian program ini tidak berpengaruh besar dalam pelayanan kesehatan, karena bantuan program ini lebih melayani pada kebutuhan pendidikan. Namun, menurut cerita eks peserta PKH Kecamatan Pagelaran mereka sudah memiliki bantuan kartu sehat dari pemerintah. Seperti dalam Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2019, kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui, dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Oleh sebab itu, program ini tidak membawa perubahan bagi informan-informan eks KPM PKH dikarenakan informan-informan tersebut merupakan penerima bantuan pada bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, jika ekonomi eks peserta PKH Kecamatan Pagelaran sudah sejahtera dari sebelumnya, kondisi kualitas kesehatannya pun lebih terjamin.

3. Perubahan Kualitas Pendidikan

Kondisi kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan anak-anak. Dengan demikian, banyak masyarakat yang hanya lulusan dengan gelar

SD/SMP. Selain itu, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak yang menganggap bahwa sekolah hanya akan menghabiskan biaya yang banyak dan belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dianggap hanya dapat membebani kondisi ekonomi keluarga dan tidak sedikit orang tua yang mendorong anaknya untuk bekerja saja. Meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah wajib belajar 9 (sembilan) tahun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk biaya transportasi, buku, seragam, makan, dan lainnya juga menjadi beban tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua.

Pencapaian tujuan PKH dalam bidang pendidikan Kecamatan Pagelaran dapat dilihat dari cerita tiap eks peserta PKH Kecamatan Pagelaran bahwa anak-anaknya sudah mendapatkan pendidikan yang baik. Salah satu pencapaian PKH di Kecamatan Pagelaran ialah memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak untuk mengakses pelayanan pendidikan yang tersedia. PKH mampu meringankan beban warga miskin untuk memenuhi pendidikan dasarnya. Para eks peserta PKH Kecamatan Pagelaran pun menceritakan bahwa setelah keluar kepesertaannya dari program tersebut juga tidak menurunkan prestasi anak. Mereka menceritakan masih tetap sama dengan sebelumnya. Sebab keberhasilan PKH di bidang pendidikan yaitu ketika anak peserta PKH rajin sekolah sampai menyelesaikan pendidikan wajar (wajib belajar 12 tahun) serta dapat bekerja untuk menopang anggota keluarga dari bidang ekonominya.

Selain dampak perubahan positif yang dirasakan oleh eks peserta PKH Kecamatan Pagelaran, sangat disayangkan dalam pelaksanaan PKH masih ada eks peserta pada saat masih menjadi peserta yang menimbulkan dampak negatif seperti bantuan yang tidak fungsional, maksudnya adalah bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH kerap kali disalahgunakan oleh peserta guna untuk memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya.

Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah graduasi KPM dari PKH untuk mandiri dan secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan PKH yang selama ini didapatkannya. Hasil pelaksanaan PKH Kecamatan Pagelaran

sudah mencapai tujuan PKH yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan PKH 2019 yang diinginkan dan mampu mendorong perubahan dalam perbaikan kondisi ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari eks KPM PKH yang keluar secara mandiri karena merasa dan dianggap sudah mampu dan tidak perlu lagi di bantu. Selain itu, dampak dari adanya kebijakan graduasi mandiri ini dapat merubah perilaku peserta program agar tidak bergantung terus dengan adanya bantuan tersebut.

Tidak berfungsinya bantuan dengan semestinya oleh beberapa eks peserta PKH Kecamatan Pagelaran yang sudah keluar secara mandiri merupakan bukti bahwa masih banyak orangtua yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Peran pendamping memang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk melakukan pendataan dan mendampingi dalam kegiatan penyaluran bantuan, melainkan harus mendorong untuk memotivasi kesadaran yang selama ini belum dimiliki oleh peserta PKH Kecamatan Pagelaran.

V. PENUTUP

Simpulan

PKH di Kecamatan Pagelaran secara umum telah mampu mendorong terjadinya perubahan pada Keluarga Penerima Manfaat. Perubahan-perubahan tersebut memberikan dampak kepada masyarakat pra sejahtera keluar dari zona kemiskinan. Meskipun dampak tersebut belum dapat dikatakan sebagai perubahan yang signifikan, akan tetapi perubahan tersebut memberikan dampak yang positif dalam rangka pengentasan kemiskinan jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari cerita para eks KPM PKH yang keluar secara mandiri karena merasa sudah mampu dan tidak perlu dibantu lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Pagelaran tentang dampak Program Keluarga Harapan terhadap eks KPM PKH yang keluar secara mandiri, maka peneliti menyimpulkan dampak Program Keluarga Harapan terhadap eks

KPM PKH dengan indikator yang telah digunakan sebagai berikut:

1. Perubahan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi eks KPM PKH setelah keluar secara mandiri ini berarti sama dengan meningkatnya status ekonominya yang sebelumnya pra sejahtera menjadi sejahtera.

2. Perubahan Kualitas Kesehatan

Perubahan kondisi ekonomi eks KPM PKH yang meningkat secara tidak langsung mempengaruhi kualitas kesehatan pada eks KPM PKH. Sehingga kualitas kesehatannya pun menjadi terjamin.

3. Perubahan Kualitas Pendidikan

Program Keluarga Harapan juga memberikan dampak yang positif terhadap kualitas pendidikan anak usia sekolah. Walaupun sudah keluar kepesertaannya dari program tersebut, kualitas pendidikan anak eks KPM PKH tidak mempengaruhi menurunnya prestasi anak.

Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan PKH khususnya pelaksanaan PKH di Kecamatan Pagelaran, saran-saran yang dimaksud meliputi:

1. Peneliti menyarankan agar peran pendamping harus terus ditingkatkan kepada peserta PKH mengenai kewajiban dan penggunaan bantuan sosial yang telah diterima oleh peserta, agar tidak terjadi penyelewengan terhadap bantuan tersebut kepada penerima program.
2. Peran dari pemerintah daerah diharapkan memberikan motivasi kepada RTSM sehingga dalam jangka panjang dapat membawa dampak yang lebih baik bagi generasi selanjutnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bappenas. 2009. *Laporan Akhir Program Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan 2009: Deteksi Dini Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesehatan dan Pendidikan.*

Bappenas: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Davies, R. & Dart, J., 2005. *The 'Most Significant Change' (MSC) Technique.* United Kingdom: CARE International

Dunn, W.N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Husnizal, E. dkk., 2008. *Masyarakat Bicara: Monitoring dan Evaluasi Partisipatif.* Aceh: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) Banda Aceh

Klugman, Julie. 2007. *Cerita Perubahan yang Mendasar (Most Significant Change Stories): Sebuah Panduan untuk Fasilitator.* Denpasar: Team Leader ACCES

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mukhotib, dkk., 2016. *Dari Penelitian ke Gerakan Perubahan (Sebuah Cerita Perubahan).* Yogyakarta: PKMK FK UGM

Nainggolan, T. dkk., 2012. *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi.* Jakarta: P3KS Press

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sardjo, S., Darmajanti, L., & Boediono, K. C., 2016. *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS): Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo, J. 2018. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik).* Malang: Banyumedia Publishing

Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi.* Jakarta: Medpress

Jurnal dan Skripsi:

Agustina, Isna Fitria., & Octaviani, Ricka. "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan

- Pengembangan Kawasan *Mix Use* di Kecamatan Jabon". *JKMP*, 4 (2), 155
- Isnaini, Rani. 2018. "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung
- Kementerian Sosial R.I. 2016. *Pedoman Umum PKH (Program Keluarga Harapan)*. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Nugraha, K., & Lewis, P., 2013. "The Impact of Cash and Benefits in Kind on Income Distribution in Indonesia". *Proceeding of the International Conference on Social Science Research*, 389.
- Ratna Sari, Octavia. 2015. "Evaluasi Dampak Program KB bagi Keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS-1) di Kota Bandar Lampung". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Syawie, M. 2011. "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial". *Informasi*, 16 (03), 217
- Widiarma, A., & Suwitri, Sri., 2016. "Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga Di Kota Semarang". *Widiarma*, 5 (3)

Peraturan Pemerintah:

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017. *Tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI

Sumber-Sumber Lainnya:

- Hikmat, R. Harry. 2018. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Diakses di <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/PEDOMAN%20PELAKSANAAN%20PKH%202019.pdf> pada tanggal 26 Juli 2020
- Radar Tanggamus. 2018. *Pringsewu Matangkan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Diakses di: radartanggamus.co.id/2018/05/02/pringsewu-matangkan-program-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/ pada tanggal 10 Desember 2019
- Wilopo. 2012. *Monitoring Evaluasi Partisipatif (MEP)*. Diakses di: wilopo.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/monitoring-evaluasi-partisipatif.pdf pada tanggal 14 Januari 2020